PERAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (PLUT KUMKM) KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Muhtar Rifai¹, Kasih Prihantoro², Panji Suwarno³

Student in Defense Economics Department, Indonesia Defense University, Indonesia¹

Lecturer in Economics Department, Indonesia Defense University, Indonesia^{2,3}

E-mail: muhtarriefai14@gmail.com¹, kasihpri@gmail.com², suwarnop@yahoo.com³

Abstract

This study focuses on discussing the role of the integrated business service center for micro, small and medium enterprises (PLUT KUMKM) as a facilitator provided by the government to boost Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in various aspects through the concept of community economic empowerment which is realized in the form of coaching. Guidance consisting of training and product marketing is a step to transform into leading Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) according to the progress of the times. The writing of this article uses a descriptive qualitative method which aims to provide an overview of the object under study. Meanwhile, data collection techniques to collect data and information are carried out through observations, interviews, and sources of documents or literature in the form of (books, magazines, journals, etc.) and conclude them objectively. The results of the study explain that to reduce unemployment, the government implements a strategy of empowering the community's potential businesses. The empowerment is not only in terms of funding assistance but also in facilitating the business sector to develop. PLUT KUMKM Tulungagung is a government facilitator in providing integrated sustainable insights, entrepreneurship training, and broader product marketing. The final goal to be achieved in addition to reducing unemployment is to create new small businesses, increase income and per capita equity, and realize regional economic resilience.

Keywords: PLUT KUMKM, Economic Empowerment, MSMEs (UMKM), Economic Resilience

---

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menjelaskan bahwa usaha kecil memiliki kedudukan, potensi, dan peranan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Peran serta usaha kecil mampu untuk memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga tingkat stabilitas nasional (Taufik, 2017). Usaha mikro kecil dan menengah direpresentasikan sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting terhadap sebagian besar penduduk yang masih berpendidikan dibawah standar dan hidup dalam usaha kecil sektor tradisional maupun modern. Era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan penilaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dikendalikan perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya berdasarkan pada

nilai aset awal, pendapatan rata-rata per tahun atau jumlah pekerjaan tetap. Eksistensi UMKM tidak dapat diragukan karena mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, utamanya setelah kritis ekonomi. Perekonomian yang berbasis pada usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai banyak sisi positif yang meliputi mampu mendorong seseorang untuk bekerja keras, disiplin tinggi, dan meningkatkan daya kreativitas, serta inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan tinggi (Nirwana *et.al*, 2017).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia memiliki jumlah terbesar kedua di dunia dilihat dari jumlah UMKM per seribu penduduk hanya kalah dari Brunei Darussalam yang memiliki 122 UMKM per seribu penduduk di Indonesia yang mana lebih tiga kali lipat rata-rata dunia yang hanya mencapai 31 UMKM per seribu penduduk (Abduh, 2017). Per Juni 2013, jumlah ini telah meningkat menjadi 55,2 juta UMKM yang berarti mencapai 220 UMKM per seribu penduduk, jika pertumbuhan penduduk dihitung sebesar 1,49%, sama dengan pertumbuhan penduduk Indonesia 2000-2010.

Penanggulangan terhadap kemiskinan melalui pengembangan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena pada kenyataannya sektor UMKM memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya dalam memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan diprediksi akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya, sehingga angka pengangguran dapat dikurangi. Hasil akhir yang dicapai yaitu digunakan untuk pengentasan kemiskinan (Supriyanto, 2006).

Pembinaan di pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah (PLUT-KUMKM) memberikan pengetahuan secara luas dan langsung dalam melatih masyarakat supaya lebih kompeten dan dapat memunculkan inovasi-inovasi baru dalam mendirikan usaha. UMKM digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Pembinaan PLUT- KUMKM berupaya meningkatkan produktivitas kerja. UMKM dengan cara mengadakan program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun instansi tersebut. Pembinaan dipandang sebagai salah satu prekursor penting yang mempengaruhi produktivitas kerja.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority* to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Hutomo, 2000).

Karl Marx menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka lain halnya menurut Fiedmann, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis (Hutomo, 2000). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Sumodiningrat dalam Hutomo (2000) menjelaskan, konsep pemberdayaan ekonomi intinya dikemukakan pada hal-hal berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
4. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ketahanan Ekonomi

Konsep Ketahanan Nasional menurut Suryohadiprojo (1997) pada dasarnya mirip dengan konsep keamanan komprehensif, hanya saja letak perbedaannya yakni pada cakupan konsep Ketahanan Nasional yang lebih luas meliputi Sosial-budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Selain digunakan untuk menghadapi agresi dari luar, ketahanan nasional dimaksudkan untuk mengatasi seluruh tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dialami satu bangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan kelangsungan hidupnya. Sedangkan Ketahanan ekonomi nasional menurut Marlinah (2017) merupakan kondisi dinamika kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yakni yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketahanan Nasional dalam bidang Ekonomi sejatinya tercermin dalam berbagai kondisi kehidupan perekonomian bangsa ketika suatu bangsa dapat memelihara Ekonomi Nasional secara mandiri, memiliki kemampuan memelihara stabilitas perekonomian yang sehat dan dinamis, serta memiliki kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata (Marlinah, 2017).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sugiyono (2012) menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul apa adanya, tanpa menganalisis dan membuat kesimpulan yang diterima secara umum. Teknik pengumpulan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati secara jelas suatu keadaan bagaimana peran PLUT KUMKM Tulungagung dalam melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi dan data-data langsung dari informan yakni PLUT KUMKM Tulungagung melalui daftar pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi difungsikan untuk mengetahui bukti-bukti informasi tentang objek yang diteliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, atau pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. Pada dasarnya pembinaan ialah suatu tindakan yang diarahkan untuk kemajuan, peningkatan atau perbaikan atas sesuatu. Pada lingkungan dunia usaha pembinaan karyawan atau dalam hal ini adalah para pelaku UMKM merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk membentuk kepribadian yang berbudi luhur, disamping itu untuk meningkatkan kecakapan, keterampilan, dan keahlian dalam menunjang kelancaran usaha (Ridwan *et.al*, 2014).

Ada dua unsur pembinaan, bisa berupa suatu Dasar pembinaan usaha industri kecil ialah Undang-Undang Perindustrian No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan peraturan No. 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Proses pembinaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam berbagi usaha dapat dilakukan melalui dua model intervensi, yaitu level makro dan level mikro. Intervensi makro menggambarkan bagaimana institusi. Negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan dalam satu masyarakat. Sedangkan intervensi mikro, dimana individu dan kelompok dalam masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri.

Kelebihan dan Kelemahan UMKM di Indonesia

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang ialah:

1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai 50% tenaga kerja yang tersedia.
2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
4. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil yang sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
5. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait (Rahmawati *et.al*, 2020).

UMKM hari ini juga memiliki kelemahan, yang sering menjadi faktor penghambat dan permasalahan, yaitu :

1. Permasalahan Internal

Masalah internal merupakan persoalan-persoalan yang timbul dalam UMKM itu sendiri yang sifatnya menghambat perkembangan usaha. Masalah internal UMKM terfokus pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, kurangnya permodalan, masalah teknologi, serta masalah organisasi dan manajemen. Berikut ini ialah penjelasan mengenai masalah-masalah tersebut :

a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Panel Diskusi Nasional Indonesia tentang penguatan industri kecil menengah (2001) merumuskan berbagai faktor yang menjadi halangan (*barrier*) dalam peningkatan daya saing dan kinerja industri kecil Indonesia. Rendahnya kualitas tersebut meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu dan standarisasi produk, serta wawasan berwirausaha.

Kualitas sumber daya manusia memang menjadi faktor penting dalam pengembangan sebuah usaha. Dalam kasus UMKM harus diakui bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala yang belum bisa tertangani dengan baik, misalnya dengan tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, profesionalisme, Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif rendah.

Kualitas SDM yang rendah juga dapat berdampak pada lemahnya inovasi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Tingkat pengetahuan yang rendah, baik langsung maupun tidak langsung, menjadikan kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan usaha menjadi kurang maksimal. Sedangkan, inovasi menjadi kunci utama untuk dapat memenangkan persaingan pasar. Melalui adanya pembinaan yang dijalankan oleh PLUT-KUMKM harapan tinggi UMKM dapat menambah potensi keahliannya dan dapat meningkatkan pendapatannya melalui pembinaan terpadu berkelanjutan.

b. Lemahnya Jaringan Usaha Dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan penetrasi adalah terbatasnya kapasitas produksi dan kualitas yang kurang mampu memenuhi tuntutan pasar. Hal ini berbeda dengan usaha skala besar yang telah mempunyai jaringan yang solid serta didukung teknologi yang mampu menjangkau tuntutan pasar internasional dengan dukungan program promosi yang baik.

c. Kurangnya Modal

UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal si pemilik yang sangat terbatas, sementara modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta bank sulit terpenuhi.

2. Permasalahan Eksternal

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM, meskipun dari tahun ke tahun terus di sempurnakan, belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat dari masih adanya persaingan kurang sehat antara pengusaha UMKM dan pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing. UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien serta dapat menghasilkan produksi dengan produktif dan efisien serta dapat menghasilkan produk yang sesuai keinginan

pasar global dengan standar kualitas tertentu, seperti isu kualitas, isu lingkungan, isu HAM, dan isu ketenagakerjaan. UMKM diharapkan dapat mempersiapkan diri agar mampu dapat bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

d. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Pemberdayaan Ekonomi Oleh PLUT KUMKM Tulungagung

Pembinaan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM memiliki beberapa tujuan yaitu mengenai bagaimana meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam meningkatkan kinerja usahanya, sehingga dapat bersaing dalam perdagangan bebas yang akan dihadapi. Upaya peningkatan kinerja yang tangguh dan mandiri secara otomatis diharapkan dapat memberikan metode pengelolaan keuangan yang tepat demi kelancaran arus kas serta pembayaran pinjaman terjaga.

Pembinaan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM Tulungagung merupakan pembaharuan atau usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi para mitra dan *stakeholders*. Pembinaan yang dilakukan kepada para pelaku UMKM umumnya yaitu pelatihan dan pemasaran produk, dimana kedua macam pembinaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan.

Dampak yang cukup efektif atas keberadaan PLUT-KUMKM Tulungagung yaitu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyani (2018) dimana menyatakan bahwa pembinaan yang meliputi pelatihan dan pemasaran produk dapat meningkatkan pendapatan bagi UMKM. Pendapatan merupakan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya.

Tabel 1. Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah UMKM (Unit)	44 633	48 650	51 569	53 488	57 897
Modal Usaha (000 Rp)	1 070 546 350	1 166 895 522	1 236 909 253	1 274 016 530	1 375 949 718
Volume Usaha (000 Rp)	1 348 189 255	1 469 526 288	1 557 697 865	1 679 275 119	1 817 105 969
Jumlah karyawan (Unit)	233 085	233 085	247 070	261 055	280 065

Sumber: tulungagungkab.bps.go.id

PLUT-KUMKM Tulungagung turut andil besar dalam penetrasi UMKM di Tulungagung sendiri. Berkat layanan terpadu dan berkelanjutan yang telah dilakukan, UMKM di Kabupaten Tulungagung terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sejak 2014 hingga 2018 pada jumlah UMKM, modal usaha, volume usaha, dan jumlah karyawan. Para pelaku UMKM telah menyadari pentingnya pembinaan dan banyak UMKM yang ingin mengikuti pembinaan. Setidaknya pembinaan maupun pelatihan telah memberikan gambaran prosedur pengurusan legalitas usaha, program-program kemudahan oleh pemerintah bagi para pelaku UMKM, serta pengalaman kepada mitra yang mengikuti pembinaan sehingga mereka termotivasi untuk terus mengembangkan usahanya untuk dapat mewujudkan ketahanan perekonomian daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ilmiah di atas disimpulkan bahwa untuk mengurangi pengangguran, strategi pemerintah adalah melalui pemberdayaan usaha potensial yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya pemberdayaan tidak selalu kemudahan mendapat suntikan dana permodalan, namun kemudahan akses pendanaan bagi usaha yang tengah berkembang. Dalam hal ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu berperan penting dalam mentoring berjalan, pelatihan, akses memasarkan produk agar dikenal secara luas, dan lain sebagainya. Keberadaan PLUT-KUMKM Tulungagung juga berdampak terhadap kemunculan usaha-usaha kecil baru dan cukup efektif menstimulus semangat usaha masyarakat. Keberadaan usaha masyarakat yang semakin banyak tentu menyerap tenaga kerja lebih, adanya peningkatan pendapatan, dan pemerataan perkapita. Masyarakat menjadi lebih produktif dan dapat menjadi basis atau sentra percontohan UMKM, sehingga mampu dalam mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Thamrin. (2017). Strategi Internasionalisasi UMKM. Makasar: CV Sah Media.
- Apriyani. (2018). Strategi Pemberdayaan UMKM Oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UPT PLUT KUMKM) Provinsi Riau. Jurnal JOM FISIP. Volume 5, Edisi II, hh 1-12.
- Hutomo, Mardi Yatmo. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat. Naskah Nomor 20. Bappenas.
- Joko, S. D., Tegor. (2019). National security of investment climate: a case study in the South Sulawesi region of indonesia. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 85(1).
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta.
- Marlinah, Lili. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. Jurnal Cakrawala. Volume 17, Nomor 2, hh 258.
- Nirwana, Devi Chandra *et.al.* (2017) Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik. Volume 3, Nomor 1, hh 2.
- Rahmawati, Ita *et.al.* (2020). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Untuk Pengembangan UMKM Kabupaten Jombang. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Sulivyo, L., Siswoko, R., & Tegor, T. (2019). The Effectiveness of Holistic Marketing and Word-of-Mouth Communication on Purchasing Decision at Pt Asuransi Central Asia Branch Office of Tiang Bendera West Jakarta. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(1), 187-199.
- Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 3, Nomor 1, hh 1.
- Suryohadioprojo, Suyidiman. (1997). Ketahanan Nasional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional. Volume 2, Nomor 1, hh 13.
- Taufik, Ade Irawan. (2017). Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. Jurnal RECHTSVINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 6 Nomor 3, hh 373.
- Husein, U. (2017). Compensation analysis in relationship moderation between transformational leadership style and work environment on the employee performance. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 71(11).
- Tegor, T., Yusmalina, Y., & Haqiqi, F. (2021). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN KUALITAS APARATUR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun). JURNAL CAFETARIA, 2(1), 13-24.
- Yusmalina, Y., Tegor, T., Haqiqi, F., Rosady, R. E., & Azura, N. (2021). Comparative Analysis of Staretegi Traditional Market and Modern Markets of Consumer Valuation. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(11), 18-25.
- Badan Pusat Statistik Tulungagung. (2019). Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung 2014-2018. Diakses pada 19 Desember 2021 melalui <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/10/02/5014/perkembangan-umkm-di-kabupaten-tulungagung-2014-2018.html>.